

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abdul Razak. 2021. *Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Hukum Administrasi Negara*. Litera Inti Aksara. Yogyakarta.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Vol.1, Kencana. Jakarta.
- Achmad Ruslan. 2021. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Rangkang Education. Tangerang.
- Aminuddin Ilmar. 2021. *Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan*. Unhas Press. Makassar.
- Amstrong Sembiring. 2009. *Energi Keadilan*. Masyita Pustaka Jaya. Medan.
- Arifin Soeriaatmadja. 2010. *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*.
- Astim Riyanto. 2000. *Teori Konstitusi*. Yapemdo. Bandung.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Bagir Manan. 1996. *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. FH UNLA. Bandar Lampung.

- Bahder Jihan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Elisabeth Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mira Buana Media Yogyakarta,.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Karen Leback, 2018. *Teori-Teori Keadilan*. Cetakan ke-6. Nusa Media Penerjemah Yudi Santos. Bandung.
- John Rawls. 2006. *A Theory of Justice*. Oxford University Press. 1973), diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006).
- Manfred Nowak. 2003. *Pengantar pada Rezim Hak Asasi Manusia Internasional*. Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law dan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan I; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* : Edisi Revisi. PT. Kanisius. Yogyakarta.
- Max Boli Sabon. 2019. *Pendekatan Dogmatik Hukum dan Teori Hukum Terhadap Fungsi Sosial Hak Milik Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila*. Atma Jaya.Jakarta.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Nusa Pedia. Bandung.
- O. Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*. Griya Media, Salatiga.
- Ridwan. 2014. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum administrasi Negara ceakan ke-XII* Rajawali Press. Jakarta. Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswono Yudo Husodo. 2009. *Menuju Welfare State*. Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan Ekonomi, dan Politik, Baris Baru, Jakarta. Soejono
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soejono dan Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Sri Soemantri. 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Almani. Bandung.
- Suratman. 2019. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi 1 Cetakan 1*. Depok PT. Rajawali Pers. Depok

Winarno dan Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Undang -Undangn Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian NKRI
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- Permenkes No. 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

- Keputusan Menteri Agama Nomor 1456 Tahun 2022 tentang Persyaratan Kepsertaan Program JKN dalam Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah(PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
- Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Pada Kementerian Agama.
- Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.
- Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
- Deklarasi Alma Ata merupakan bentuk kesepakatan bersama antara 140 negara (termasuk Indonesia) pada tahun 1978.
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan jaminan Kesehatan Nasional
- Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

C. JURNAL

B. Arief Sidharta. 2004. Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera Jurnal Hukum Rule of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Friedrich, C.J., Man and His Government, McGraw-Hill. New York. 1963. *Dalam Modul Konstitusi dan Konstitusionalisme, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*. Mahkamah Konstitusi.

Normina, "Masyarakat Dan Sosialisasi," Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan 12, No. 22 (2014):

Ivo D. Duchacek, Constitution/Constitutionalis dalam Bogdanor, Vernon (ed), Blackwell's Encyclopedia of Political Science, Blackwell, Oxford 1987, hal. 142. Dalam Modul Konstitusi dan Konstitusionalisme, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi.

Cipto Rizqi Agung Saputro dan Fenny Fathiyah. Universal Health Coverage: Internalisasi Norma di Indonesia. Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN).

Ahmad Nizar Shihab. 2012. Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 9 Nomor 2.

Mulyono. 2002. Jaminan Sosial Di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal, Volume 6. Nomor 1, Juli 2002, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Marilang. 2012. Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2.

Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial

Ali Marwan Hsb. 2019. *Keberadaan Instruksi Presiden sebagai Produk Hukum di Indonesia*. Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXIII Nomor . 1.

Luh Ketut Ayu Manik Sastrini. 2024. Peranan Peraturan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan. Universitas Bali Dwipa, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2, No. 2, April 2024.

Udin Latif. 2023. Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non Litigasi. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Sorong Jurnal Hukum Muadalah, Vol 3.

Lutfi Ansori. 2015. Diskresi dan Pertanggung Jawaban Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 juli 2015.

Muhammad Aziz Zaelani, 2019, Antinomi Diskresi Dalam Bentuk Freies Ermessen untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Berwawasan Pancasila, Jurnal Jurisprudence Vol,9 No.1,

Hamid S. Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Studi Kasus Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*. Disertasi Doktor Universitas Indonesia.

Saksi R.S. Rakia. 2021. *Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan yang Dibentuk oleh Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Rechtvinding Vol. 10.

Yunita Syofyan dan Delfina Gusman. 2023. *Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. UNES Journal of Swara Justisia, Volume 7, Issue 1, April 2023.

Eben Henry R M Sa Dan Dian Arsitha W, 2024, Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Indonesia, Konferensi Nasional Ilmu Administrasi,

Mustainah, 2023, Tesis : Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Implementasi Konsep Negara Kesejahteraan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Karina Fachrun Nisaa, Timbul Dompok, dan Karol Teovani Lodan, 2024, Perbandingan Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia Dan Di Singapura, Seminar Nasional dan Teknologi.

C. Sumber Lain

- <https://www.kemenkopmk.go.id/ini-ragam-upaya-pemerintah-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-sosial>, pada tanggal 26 Juni 2024
- https://www.setneg.go.id/baca/index/kejar_target_98_uhc_pada_tahun_2024_wapres_instruksikan_empat_langkah_strategis Kementerian Sekretariat Negara RI,
- Diakses dari : <https://infiniti.id/blog/legal/bpjs-syarat-layanan-publik>
- Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia->
- Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2023
- Diakses dari <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/reformasi-sistem-perlindungan-sosial-indonesia>
- Artikel : Purnomo Sucipto, 2015, Sekretariat Kabinet RI, Pemerhati Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
- Artikel :Berita, Bayu Dwi Anggono, 2015, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Kuasa Mengatur Negara
- Muhammad Yusuf Aldimassarif, Suara.com, Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam penanganan Covid-19, <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka.

- Imam Budilaksono, Kantor Berita Antara, DPR: Batalkan kebijakan kepesertaan BPJS syarat layanan pertanahan, Minggu, 20 Februari 2022 06:30 WIB
- Tribrata News, Polri Bakal Berlakukan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Pembuatan SIM, STNK dan SKCK23 February 2022 - 11:28 WIB
- Wikipedia Jaminan Sosial di Singapura